

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Asri Harahap, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilukada*, Jakarta : Cisendo.
- Ahmad Hudri, 2020, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, Malang : Inteligencia Media.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2011. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah : Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Edward Aspinal, 2015, *Politik Uang di Indonesia*, Yogyakarta : PolGov.
- Elvi Juliansyah, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung : Mandar Maju.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Gary Goodpaster, 2001, *Refleksi Tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta : USAID.
- Indra Ismawan, 1999, *Money Politic Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- L. Sumartini, 2004, *Money Politic dalam Pemilu*, Jakarta : Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Miriam Budirjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mukhtar Sarman, 2015, *Pilkada Serentak : Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta : PT.LKiS Printing Cemerlang.
- Prayudi dkk, 2017, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Roem Topatimasang, 2011, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*, Jakarta : Maarif Institute.

Saldi Isra, 2014, *Pemilihan Umum Serentak*, Jakarta : Rajawali Pers

Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Pers.

Stepi Anriani, 2018, *Intelijen & Pilkada*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pemilukada Serentak*, Bandung : Mizan Publika.

Tommi A. Legowo, 2006, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal*, Jakarta : Adeksi

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Jurnal

Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung* (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung), Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009. diakses melalui https://onsearch.id/Record/IOS1242.article-66?widget=1&repository_id=2419, pada 20 Maret 2023 pukul 20:30 wib.

Mohammad Saihu, 2019, *Pengembangan Pemilu Berintegrasi Hukum Kode Etik dan Etik*, Jurnal Etika dan Kode Etik Pemilu Vol.5, No.1, hlm.20 diakses melalui <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep>.

R. Nazriyah, 2015, *Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.22, No.1, Januari 2015, hlm.138. diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4610>.

Yusdianto, 2010, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya.*, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm.44. diakses melalui <http://repository.uib.ac.id/613/5/S-1251062-chapter2.pdf>, pada 01 Oktober 2023 pukul 15:10.

D. Sumber Lainnya

Jeka Kampai, *Kubu Sutan Laporkan Dugaan Politik Uang Pihak Lawan ke Bawaslu Dharmasraya*, <https://news.detik.com/berita/d-5285177/kubu-sutan-laporkan-dugaan-politik-uang-pihak-lawan-ke-bawaslu-dharmasraya/2>, diakses pada 20 Maret 2023 pukul 20:26 Wib.

